



# UCP 1 KELOMPOK 2 TATA KELOLA

Retno Anjani	2010112045
Syafannisa Alifia H	2010112051
Dita Septianing Cipta	2010112052
Zahrina Amalia Rainisa	2010112053
Julia Nurhalizah	2010112056
Khansa Muthia Fakhira	2010112082



jasa pemasangan,  
pengujian dan uji  
kelayakan produk dan  
peralatan telekomunikasi



PT Katarina Utama Tbk



20 Juni 1997



Fazli bin Zainal Abidin





# Corporate Governance

"Corporate governance adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan."



# Kebijakan Corporate Governance



1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan

Besaran remunerasi anggota Direksi disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi yang dikaitkan dengan

3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota Direksi

4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.

# Kebijakan Corporate Governance



Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar

**2009**

Rp 0,20 milyar

**2010**

Rp 1.05 milyar

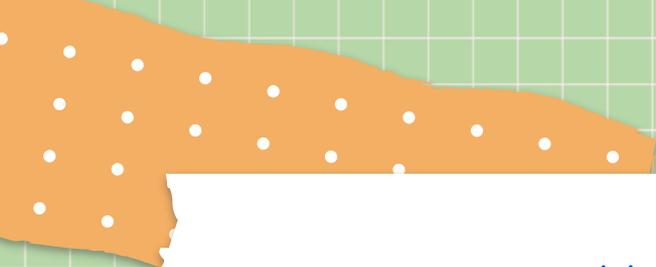
Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar

**2009**

1,68 milyar

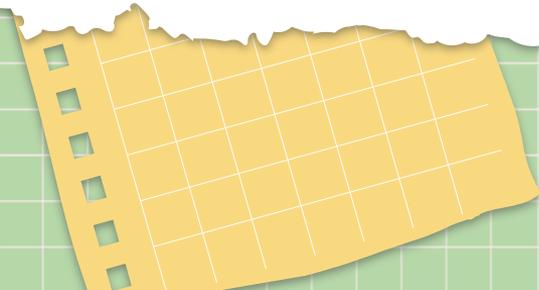
**2010**

Rp 1.48 milyar



## Akta Petikan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.35

- pengalihan saham Perusahaan milik PT Primadaya Handara dan PT Tritunggal Perkasa Investama
- perubahan status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.





Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.20 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H, pemegang saham Perusahaan antara lain

- ✓ menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 1.866.000.000 menjadi Rp 240.000.000.000
  - ✓ peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.866.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 yang berasal dari setoran tunai oleh PT Silver Mountaine sebesar Rp 52.320.600.000 dan PT Media Intertel Graha sebesar Rp 5.813.400.000
- 
- 
- 



pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Katarina Utama Tbk.
  - ✓ Perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.
  - ✓ Perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya sejumlah 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
  - ✓ Perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
- 
- 
- 

# Struktur Perusahaan



**PT Katarina  
Utama Tbk**

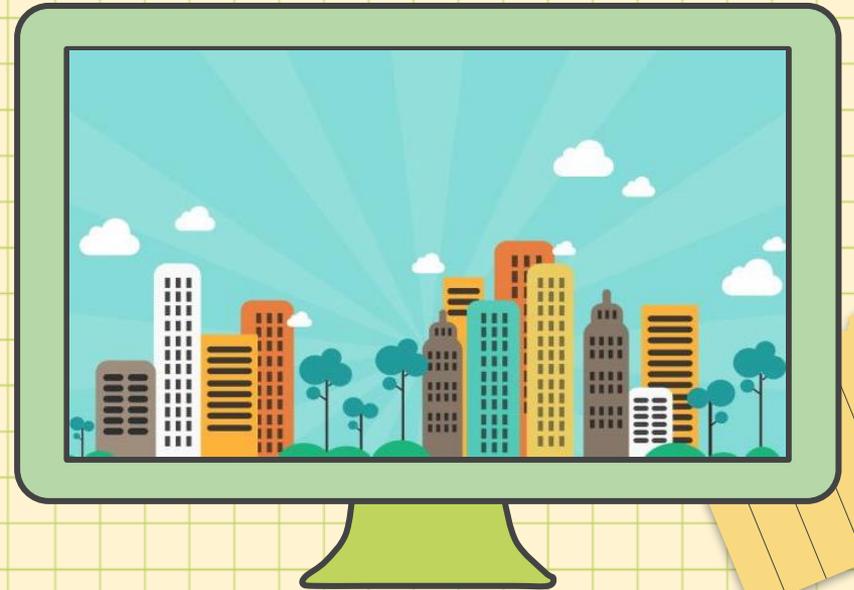


# Two Tier Board

dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan atau yang menjalankan perusahaan

	<u>2010</u>	<u>2009</u>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b><u>Komisaris</u></b>			<b><u>Direktur</u></b>		
Komisaris Utama	: Azlan Ibrahim	Teguh Trianung Djoko	Direktur Utama	: Fazli Bin Zainal Abidin	Fazli Bin Zainal Abidin
Komisaris	: -	Ramlan Merican Bin Naina Merican	Direktur	: Mohd. Aziz Bin Ismaon	-
		Budi Japadermawan	Direktur	: Izzudin Bin Mahmood	Barry Japadermawan
Komisaris	: -	Wan Kamarul Zaman	Direktur	:	Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Komisaris Independen	: Ramlan Merican Bin Naina Merican	Wan Yaacob	Direktur Independen	: -	Mohd. Aziz Bin Ismaon
Komisaris Independen	: -	Eddy Adiwinata	Sekretaris Perusahaan	: Izzudin Bin Mahmood	Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi

# Permasalahan Kasus PT Katarina Utama Tbk



# BAPEPAM-LK

Pada tanggal 10 Juni 2009, PT Katarina Utama Tbk memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per saham. Dari hasil penawaran umum tersebut PT Katarina Utama Tbk mendapatkan dana sebesar RP 33,6 miliar.





# PT Katarina Utama Tbk



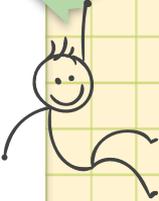
PT Katarina Utama diduga telah mempercantik atau mengubah angka laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan keuangan 2008 nilai asset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Begitu pula dengan ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar.

Layaknya tahun 2008, laporan keuangan tahun 2009 juga diduga penuh angka-angka fiktif. Dalam laporan keuangan audit 2009, Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar RP 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar.

# ketidaksesuaian laporan keuangan PT Katarina Utama Tbk



1. Setahun penyelewengan dana IPO mulai disadari oleh otoritas bursa dan pasar modal atas laporan pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK). PT Katarina Utama Tbk diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar Rp 28,971 miliar dari total yang diperoleh sebesar Rp 33,60 miliar.
2. Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal.
3. Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Utama Tbk (RINA) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akhyadi Wadisono memberikan opini **disclaimer** selama tahun 2010 dan 2011.
4. Tanggal 1 Oktober 2012 otoritas bursa memberikan sanksi administratif dan melakukan delisting atas saham PT Katarina Utama Tbk, yang berkode RINA.



## Dampak Kasus

Akibat kasus ini perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak karyawannya. Bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan, ada juga karyawan yang tidak mengikuti jamsostek tetapi gajinya juga ikut dipotong. Perusahaan Listrik Negara telah memutuskan aliran listrik ke kantor cabang PT Katarina Utama di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan 3 bulan berjalan.





# PELANGGARAN PRINSIP CG PT KATARINA UTAMA TBK



01

## *Transparency*

PT Katarina utama Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan, mencatat piutang fiktif serta penggelembungan aset

02

## *Accountability*

PT Katarina Utama Tbk merealisasikan dana hasil IPO tidak sesuai dengan prospektus perseroan

03

## *Responsibility*

PT Katarina Utama Tbk hanya merealisasikan dana IPO sebesar 4,6 Miliar , sisanya untuk keuntungan pribadi. Serta tidak bertanggung jawab atas gaji karyawan.

04

## *Independency*



PT Katarina Utama Tbk tidak independen karena telah memanipulasi laporan keuangan atas keinginan manajemen



## PELANGGARAN PRINSIP GG PT KAI 2005 (CONT.)

### *Fairness*

05

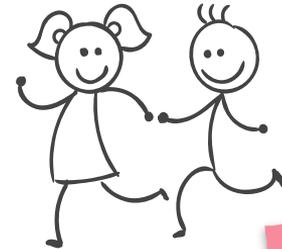
Dalam kasus ini PT Katarina Utama Tbk diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di perusahaan tersebut. Serta pemotongan gaji karyawan atas asuransi dengan alasan yang tidak jelas.

## DASAR TEORI

# 1. AGENCY THEORY



Teori keagenan/agency adalah sebuah asumsi bahwa konflik kepentingan akan terjadi jika setiap individu termotivasi untuk kepentingan pribadi. a adanya peluang yang tidak akan diketahui oleh prinsipal. Kecurangan PT Katarina dalam mempercantik laporan keuangan terjadi dikarenakan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi. Dalam teori keagenan, agen melakukan kecurangan karena adanya peluang dan jabatan yang tidak akan diketahui oleh prinsipal. Faktor lain yang mendorong tindak kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan adalah karena tekanan dari prinsipal kepada agen untuk mencapai target kinerja keuangan tertentu. Agen akan berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya walaupun kadang dengan melakukan praktik akuntansi kreatif yang kurang beretika.



## 2. STAKEHOLDER THEORY

- Pada kasus PT Katarina Utama, pihak yang dirugikan adalah pemangku kepentingan. Para pemegang saham dirugikan, dikarenakan PT Katarina mengubah angka pada laporan keuangan.
- PT Katarina juga tidak dapat memenuhi hak para karyawannya, bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan



# 3. STEWARDSHIP THEORY



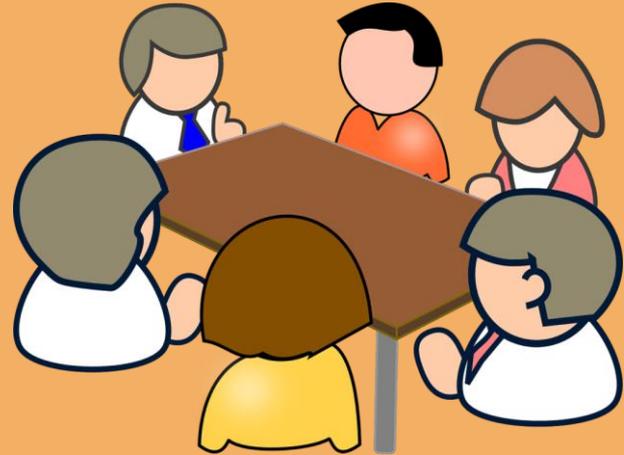
Stewardship Theory atau pemegang amanah merupakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut Teori *Stewardship* kepentingan bersama menjadi dasar dari tindakan seorang manajer. Dalam kasus PT Katarina, manajer tidak dapat memegang amanah dengan baik, hal ini karena manajer PT Katarina mengambil keputusan untuk melakukan fraud pada laporan keuangan dengan cara melebihkan pendapatan untuk mempercantik laporan keuangan. Hal ini ditujukan untuk kepentingannya sendiri agar manajer dapat dipandang memiliki kinerja yang baik dan masih banyak alasan kepentingan lainnya. Dari keputusan tersebut memberikan kerugian terutama kepada pemangku kepentingan, pemegang saham, dan masyarakat luas

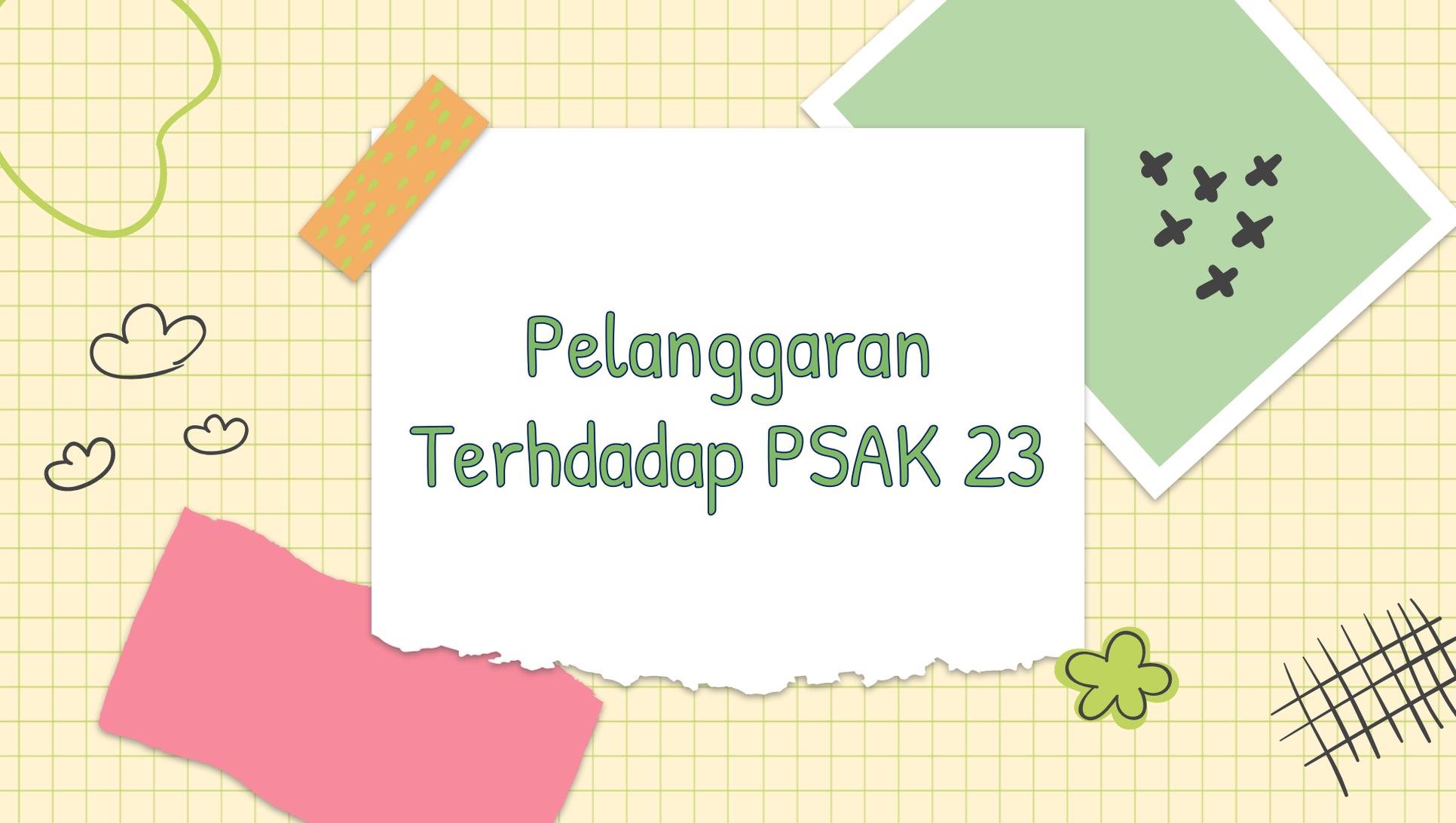


## 4. LEGITIMACY THEORY

Teori ini adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi atas keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat.

Agar investor dan masyarakat memberi pandangan baik, maka PT Katarina Utama Tbk melakukan pengakuan atas pendapatan MIG sebesar RP 6,3 miliar. Hal ini untuk memperbesar angka pendapatan.



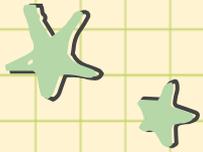


# Pelanggaran Terhdadap PSAK 23

## PSAK 23

Jika dikaitkan dengan PSAK 23, laporan keuangan PT Katarina Utama tbk tidak sesuai. Namun, manajemen PT Katarina mengklaim bahwa laporan keuangan PT Katarina tahun 2008 dan 2009 sudah sesuai dengan PSAK 23.





## PSAK 23 Paragraph 20

01

Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

02

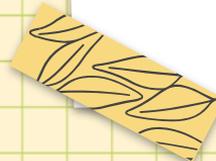
Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas

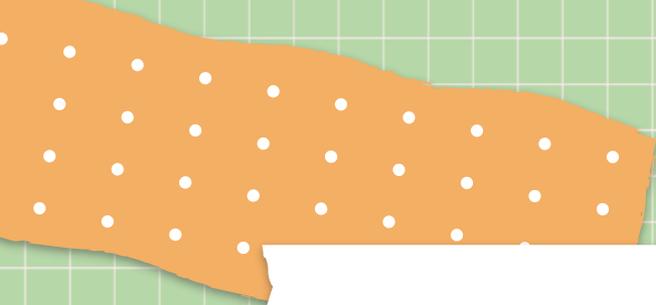
03

Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal

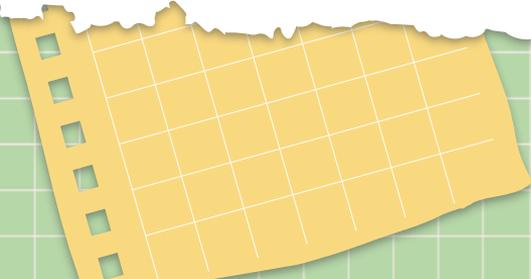
04

Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal





Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar RP 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar. Rinciannya adalah piutang proyek dari PT Bahtiar Mastura Omar Rp10,1 miliar, PT Ejey Indonesia Rp 10 miliar dan PT Inti Bahana Mandiri RP 9,5 miliar.





## A. Key Board Function



### 01 Strategy

Strategi adalah penempatan misi perusahaan.

### 02 CEO

Seseorang dengan jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi atau perusahaan.



### 03 Monitoring

Monitoring adalah proses memantau perubahan.



## A. Key Board Function



### 04 Compliance

compliance belum bekerja dengan maksimal maka kasus kecurangan ini tidak terdeteksi dengan cepat, baru terdeteksi 1 tahun setelahnya



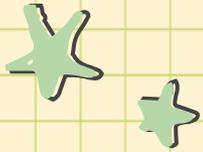
### 05 Risk Management

manajemen risiko tidak bisa mengidentifikasi risiko yang telah PT Katarina lakukan yaitu dengan memanipulasi laporan keuangannya



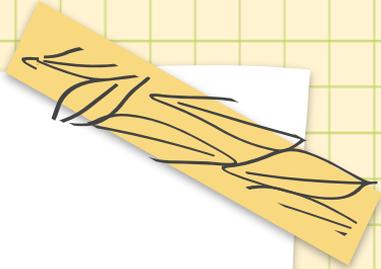
### 06 Networking

management meminjam uang kepada MIG dan membuat keputusan bahwa peminjaman ini diatas namakan perusahaan, tetapi PT Katarina belum juga membayar utangnya tersebut



## 07 Stakeholder Communication

Pada kasus ini PT Katarina Utama Tbk tidak menerapkan asas transparansi tersebut. PT Katarin Utama memberikan informasi kepada shareholders serta customers bahwa ada proyek. Pada kenyataannya, proyek ini tidak ada dan hanya fiktif belaka . Namun, pihak dari Katarina sudah mengatakan kepada calon konsumennya bahwa mereka tidak ada masalah dalam proyek ini

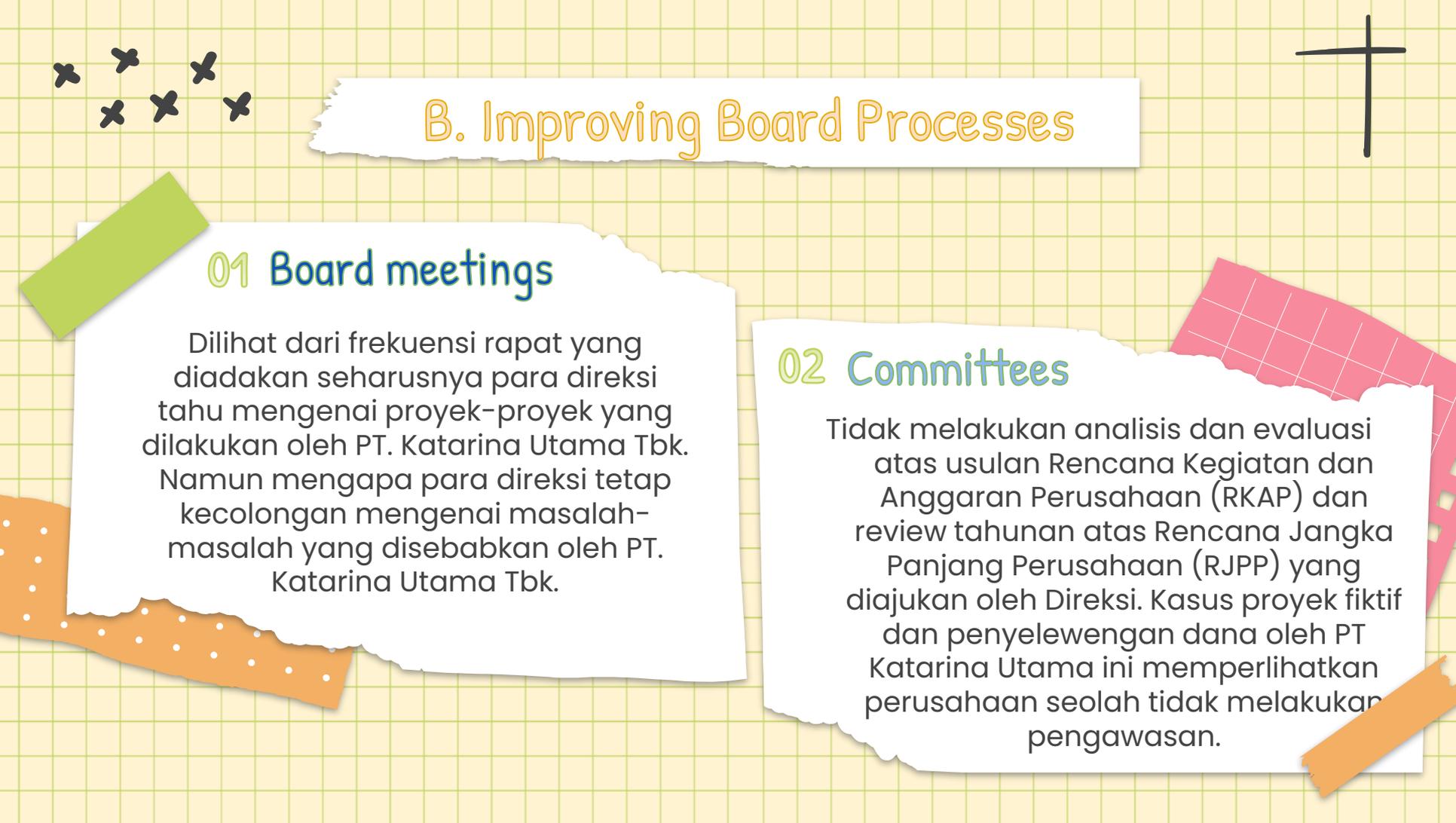




## 08 Decision Making



Dalam kasus PT Katarina Utama Tbk, telah salah mengambil keputusan untuk menggelembungkan laporan keuangan yang bertujuan untuk mempercantik laporan keuangan yang membuat *customers* tertarik dalam penawaran saham. Selain itu, PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar.



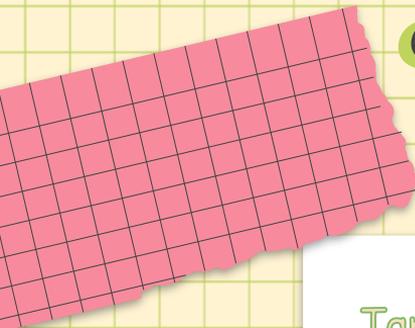
## B. Improving Board Processes

### 01 Board meetings

Dilihat dari frekuensi rapat yang diadakan seharusnya para direksi tahu mengenai proyek-proyek yang dilakukan oleh PT. Katarina Utama Tbk. Namun mengapa para direksi tetap kecolongan mengenai masalah-masalah yang disebabkan oleh PT. Katarina Utama Tbk.

### 02 Committees

Tidak melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi. Kasus proyek fiktif dan penyelewengan dana oleh PT Katarina Utama ini memperlihatkan perusahaan seolah tidak melakukan pengawasan.



## C. Board Effectiveness

### 1. Director protection

#### Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi

PT. Katarina Utama Tbk Lippo tidak menerapkan tugas dan tanggung jawab yang baik sesuai dengan Good Corporate Governance karena telah melakukan penyelewengan dan pemalsuan terhadap laporan keuangan perusahaannya.

#### Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilitas

PT. Katarina Utama Tbk selalu mengundur waktu dalam pengumpulan laporan keuangan miliknya hingga sering mendapat teguran dari BEI. Direksi seharusnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perseroan.



## 2. BOARD EVALUATION

**Evaluasi** adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.

Nyatanya pada tahun 2010, jumlah asset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp26,8 miliar. Ekuitas anjlok dari Rp97,96 miliar menjadi Rp20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp29,9 miliar, hanya tercatat Rp3,7 miliar. Perseroan pun menderita kerugian sebesar Rp77miliar dari periode sebelumnya yang memperoleh laba Rp55 miliar.

### 3. DIRECTOR SELECTION

**Director selection adalah proses pemilihan calon direksi dalam suatu perusahaan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi/perusahaan.**

Pada tahun 2009 telah diadakan pergantian kedudukan Direksi dan Komisaris. Tetapi, berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa PT Katarina Utama Tbk gagal dalam memilih direksi yang tepat. Direksi tidak menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan.

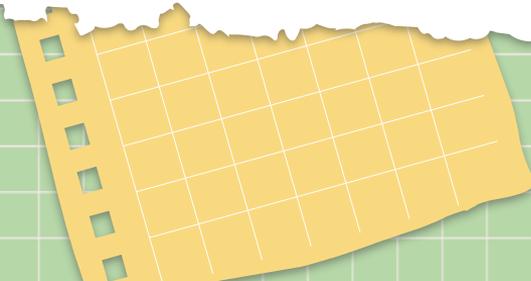


Pelanggaran Terhadap  
Corporate Governance,  
Internal Control, dan  
Business Ethic



# INTERNAL CONTROL

**Penyalahgunaan dana penawaran umum ini disebabkan karena adanya kelemahan dalam pengendalian internan PT Katarina Utama. Akibat lemahnya pengendalian internal tersebut pihak manajemen hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, sedangkan selebihnya diduga diselewengkan oleh pihak manajemen.**



# PELANGGARAN BUSINESS ETHIC



**Tanggung  
Jawab Profesi;**



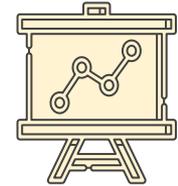
**Perilaku profesional**



**Integritas**



**Kompetensi dan  
kehati-hatian  
professional**



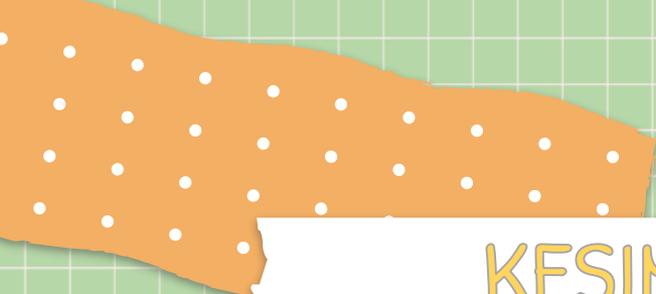
**Standar teknis**



**Kepentingan  
Publik**

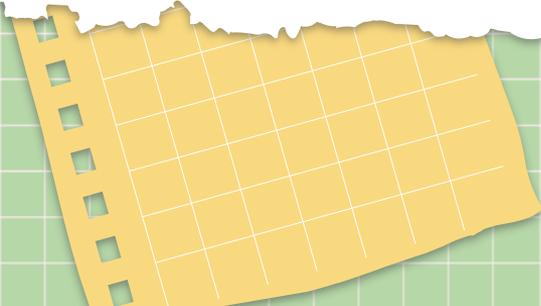


**Objektivitas**



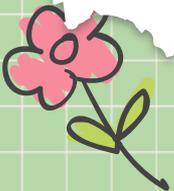
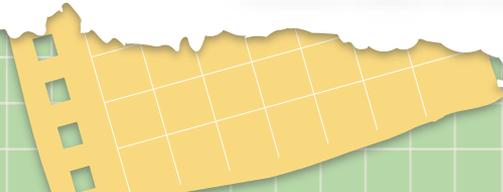
## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Katarina telah melakukan **pelanggaran** yaitu mencoba **memanipulasi pendapatan** demi mempercantik laporan keuangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dengan mudah dihindari jika suatu perusahaan sudah melaksanakan pengendalian internal dan Good Corporate Governance pada keseluruhan kegiatan dalam perusahaan tersebut dengan baik dan patut, diiringi dengan etika bisnis agar perusahaan dapat berjalan dengan sehat, beradab dan sesuai dengan regulasi yang ada.





## DAFTAR PUSTAKA

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 50.
- Gray, e. a. (1996). *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Javaid, H. M., & Javid, S. (2017). Determining Agency Theory Framework through Financial. *International Journal of Economics and Finance*, 21-28.
- KSAP. (2018). *KSAP*. Retrieved from KSAP Web site.
- Murti, A. D. (n.d.). *pdf coffee*. Retrieved from <https://pdfcoffee.com/kasus-pelanggaran-good-corporate-governance-oleh-pt-katarina-pdf-free.html>
- Rivandi, M. (2014, Desember). Retrieved from <http://muhammadrivandi18.blogspot.com/2014/12/kasus-etika-bisnis-pt-katerina-utama-tbk.html>
- Utami, D. (n.d.). *Scribd*. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/320344494/Kronologi-Kasus-Pt-Katarina-Utama-Tbk>
- Zakariya, M. (2019, Oktober). *dictio.id*. Retrieved from <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-stakeholder/121229>
- 
- 
- 